

**EVALUASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DI DESA
KOTO TUO KOPAH KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI PERIODE 2014-2020**

LISNA DEWI

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Jl. Gatot Subroto KM 7, Kebun
Nenas, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi.
Email:lisnadewi0705@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted related to the evaluation of the function of the village consultative body (BPD) in accomodating and channeling comunity aspiration in Koto Tuo Kopah village Kuantan Tengah District Kuantan Singingi Regency. The purpose of this study the function of the village consultative body in accomodating and channeling comunity aspiration in Koto Tuo Kopah village Kuantan Tengah District Kuantan Singingi Regency. So that the problem regarding the function of the village consultative body in accomodating and distributing the aspirations of the community can be proven and explained wherther the village consultative body ini the village of Koto Tuo Kopah in achieving its work has gone according to plan. This research uses descriptive qualitative research methods with the process of transforming research data in the form of a description. Based on the results of this study it can be concluded that the evaluation of the function of the in accomodating and channeling comunity aspiration in Koto Tuo Kopah village Kuantan Tengah District Kuantan Singingi regency with a number of 4 indicators was considered to be poor. Due to several things namely the lack of village deliberations and the absence of internal meetings of the BPD which led to unrealizwd aspirtion such as the construction of the Koto Tuo Kopah mosque and the absence of a blog to collect community aspirations or social accounts created by the village consultative body, as well as village consultative bodies also do not have written evidence about their village deleberation that is proof of the minutses of the village consultative decision.

Keywords: *Village consultative bodie.*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan terkait dengan Evaluasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Koto Tuo Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengevaluasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Koto Tuo Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Sehingga masalah mengenai Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat dapat di buktikan dan dijelaskan apakah Badan Permusyawaratan Desa di Desa Koto Tuo Kopah dalam pencapaian kerjanya telah berjalan sesuai dengan perencanaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif dengan proses transformasi data penelitian dalam bentuk uraian. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Evalusia Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Koto Tuo Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dengan jumlah 4 indikator dinilai kurang baik. Dikarenakan beberapa hal yaitu kurangnya Musyawarah Desa dan tidak adanya rapat internal BPD yang menyebabkan adanya aspirasi yang belum terealisasi dan tidak adanya akun media sosial seperti WA untuk menampung aspirasi masyarakat yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa, serta Badan Permusyawaratan Desa juga tidak memiliki bukti tertulis bahwa mereka melakukan Musyawarah Desa yaitu bukti daftar hadir dan bukti hasil berita acara keputusan dari musyawarah desa tersebut.

Kata Kunci: *Badan Permusyawaratan Desa.*

1. PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.

Adapun dasar fungsi BPD dijelaskan di Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 sebagai berikut:

- a. Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 61 Wewenang atau tugas BPD antara lain :

- a. Membahas rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
- e. Menggali, Menampung, Menghimpun, Merumuskan dan Menyalurkan aspirasi masyarakat.

Dari pemaparan diatas terlihat bahwa salah satu fungsi BPD adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat ini tentunya membutuhkan dukungan dari masyarakat desa. Karena dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Partisipasi masyarakat akan lebih tinggi jika adanya dorongan dan himbuan dari BPD dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Karena pada dasarnya merekalah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sebagai pemberi dorongan bagi masyarakat akan pentingnya pembangunan.

Fenomena dalam menampung aspirasi masyarakat di Desa Koto Tuo Kopah yang dilakukan oleh BPD belum efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan kurang dilaksanakannya Musyawarah Desa. Pemanfaatan teknologi atau *social network* juga tidak dilakukan Di Desa Koto Tuo Kopah Hal ini dapat di buktikan dengan tidak tersedianya Blog menampung aspirasi ataupun akun sosial resmi yang dibuat oleh BPD. Serta BPD kurang melakukan musyawarah desa ditandai dengan tidak adanya bukti tertulis hasil dari musyawarah desa tersebut, dan kurangnya BPD berinteraksi dengan masyarakat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di tandai dengan yang lebih dominan di mata masyarakat adalah kepala desa.

Kebanyakan masyarakat Desa Koto Tuo Kopah juga tidak mengetahui tugas dan fungsi BPD terutama dalam hal menampung aspirasi masyarakat. Masyarakat desa juga lebih banyak menyampaikan aspirasi mereka langsung kepada Pemerintah Desa dan bukan melalui anggota BPD. Sehingga keberadaan BPD tidak dipandang dan tidak terlihat oleh masyarakat, dan menyebabkan timbulnya anggapan negatif dari masyarakat terhadap BPD yang ada di Desa Koto Tuo Kopah dan dinilai belum bisa bekerja dengan baik.

Idealnya jika memang masyarakat tidak mengetahui tugas dan fungsi BPD, anggota BPD jangan hanya diam dan lepas tangan, ini adalah tanggung jawab mereka sebagai wakil

dari masyarakat desa yang mempunyai fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Koto Tuo Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2014-2020”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Nawawi (dalam Maksudi, 2017 : 28) Administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Litchfield (dalam Syafii, 2003 : 32) Administrasi Negara adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintah di organisir, di perlengkapi dengan tenaga-tenaganya, di biayai, di gerakkan, dan di pimpin.

Menurut Dunn (dalam Nugroho, 2004 : 185) istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.

Menurut Samodra Wibawa (dalam Nugroho, 2009 : 541-542) evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu:

1. Eksplanasi

Merupakan jenis monitoring menjelaskan adanya perbedaan antara hasil dan kebijakan. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.

2. Kepatuhan

Merupakan kesadaran atau kesediaan seseorang menaati suatu peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kepatuhan yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini cenderung gairah kerja, semangat kerja, dan terwujudnya tujuan masyarakat, maka setiap orang harus berusaha agar mempunyai kepatuhan yang baik. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.

3. Audit

Yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kompetensi dan independen dalam himpunan bukti dan melakukan evaluasi terhadap obyek yang diteliti berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dan menyampaikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah output benar-benar sampai ketangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.

4. Akunting

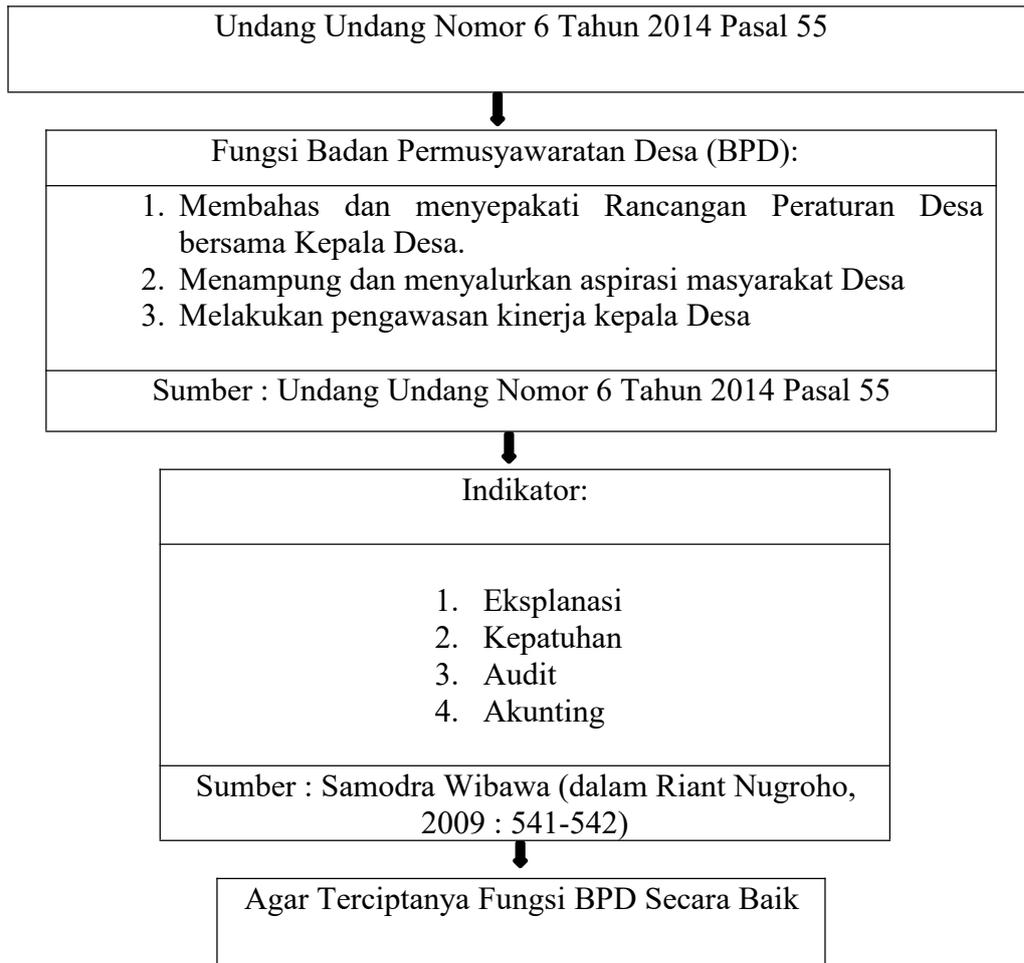
Adalah sarana yang dipakai oleh manajemen untuk mendapatkan informasi yang sistematis dalam mengumpulkan data, dan untuk menyusun. Sarana tersebut akan berupa seperangkat kebijakan, catatan prosedur, dan hubungan keorganisasian yang di desain untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan tersebut. Dengan evaluasi dapat diketahui apakah akibat sosial dari kebijakan tersebut.

Menurut Robbins (dalam Fahmi, 2016 : 2) Organisasi adalah kesatuan sosial yang di koordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat di identifikasikan, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa "Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

KERANGKA PEMIKIRAN

Gambar II.1 :Kerangka Pemikiran tentang Evaluasi Fungsi (BPD) dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Koto Tuo Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2014-2020.



Sumber : Modifikasi Penelitian 2019

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian *Survey*, dengan Eksplanasi Deskriptif dan analisis data Kualitatif. Menurut Kerlinger (dalam Sugiyono, 2007 : 7) penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar atau kecil tetapi data yang dipelajari adalah data sampel yang diambil dari populasi. Sedangkan penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2016 : 11) adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (indenpenden) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

Menurut Adi, (2010 : 132) Informan adalah orang yang di perkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian.

Tabel III. 1 :Informan Penelitian tentang Evaluasi Fungsi BPD dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Koto Tuo Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2014-2020.

No	Unsur Informan	Jumlah	
		Informan	Key Informan
1.	Unsur Pemerintah Desa	Kepala Desa	1
2.	Unsur Badan Permasyarakatan Desa (BPD)	Ketua BPD	1
		Sekretaris BPD	1
		Anggota BPD	1
3.	Unsur Masyarakat	Tokoh Pendidikan	1
		Tokoh Adat	2
		Tokoh Pemuda	2
Jumlah Keseluruhan			9

Sumber Data : Modifikasi Penelitian 2019

Dalam penelitian ini ada beberapa jenis pengumpulan data yang di gunakan penulis yaitu: 1.) Wawancara (*Interview*) Menurut Pasolong, (2013 : 137) Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut interviewer, sedangkan orang yang diwawancarai disebut interviewee. Metode wawancara bisa dilakukan secara langsung (*Personal interview*) maupun tidak langsung (*telephon atau mail interview*). 2.) Pengamatan (*Observasi*) Menurut Pasolong, (2013 : 131) Observasi merupakan suatu pengamatan secara langsung dengan sistematis terhadap gejala-gejala yang hendak diteliti. 3.) Dokumentasi (*Documentation*) Menurut Riduwan, (2009 : 31) Dokumentasi adalah ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan laporan kegiatan dan data yang relevan penelitian. 4.) Triangulasi (*Triagulation*) Menurut Moleong, (2005 : 330) Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Selanjutnya untuk menganalisa data penulis menggunakan metode Pertama Reduksi Data (*Data Reduction*) Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting. Tahapan ini peneliti memilih hal pokok yang berkaitan dengan pembelajaran yakni dengan menganalisis hal yang tertera pada intrumen penilainan perencanaan pembelajaran dan intrumen penilaian pelaksanaan pembelajaran. Kedua Penyajian Data (*Data Display*) Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumplan informasi di susun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik dan bagan. Ketiga Penarikan Kesimpulan (*verification*) Kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikam kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat di gunakan untuk mengambil tindakan. Kesimpulan yang di buat diharapkan mengungkapkan bagaimana Evaluasi Fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Koto Tuo Kopah dalam menampung aspirasi di desa tersebut.

Operasioanal Variabel Penelitian tentang Evaluasi Fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Koto Tuo Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2014-2020.

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai	Ukuran
--------	----------	-----------	-------------------	--------

Evaluasi	Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	1. Eksplanasi	a. Masalah b. Kondisi c. Aktor Yang Mendukung	a. Sangat baik b. Baik c. Cukup baik d. Kurang baik e. Tidak baik
		2. Kepatuhan	a. Sesuai Prosedur b. Semangat Kerja c. Terwujudnya Tujuan Masyarakat	a. Sangat baik b. Baik c. Cukup baik d. Kurang baik e. Tidak baik
		3. Audit	a. Penyelenggara n b. Sasaran c. Hasil	a. Sangat baik b. Baik c. Cukup baik d. Kurang baik e. Tidak baik
		4. Akunting	a. Seperangkat Kebijakan b. Catatan c. Hubungan Keorganisasian	a. Sangat baik b. Baik c. Cukup baik d. Kurang baik e. Tidak baik

Sumber Data : Modifikasi Penelitian 2019

Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa informan untuk indikator pertama yaitu Eksplanasi/Hasil dan Tujuan Kebijakan yang dilaksanakan oleh BPD. Berdasarkan Analisis peneliti Hasil wawancara dengan BPD tersebut mengatakan bahwa mereka dalam menampung aspirasi masyarakat di Desa Koto Tuo Kopah dengan cara menerima aspirasi dari masyarakat dan disampaikan ke Kepala Desa. Namun dari hasil pengamatan peneliti hal tersebut belum bisa dikatakan benar karena tidak ada bukti tertulis dari daftar hadir musyawarah desa. Seharusnya BPD lebih berantusias untuk menampung aspirasi masyarakat di Desa Koto Tuo Kopah dengan cara memimpin rapat dan rapat sesama BPD agar fungsi BPD lebih terlihat seperti yang ada di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 Ayat (2) yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

Selain itu Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa BPD dalam pengambilan keputusan selalu melibatkan wakil unsur masyarakat di Desa Koto Tuo Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Namun hal tersebut lagi-lagi belum bisa peneliti katakan dengan benar karena tidak ada bukti tertulis yaitu tidak ada bukti daftar hadir dari rapat bahwa memang benar BPD melakukan rapat dan melibatkan unsur dari masyarakat. Seharusnya jika memang benar unsur masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan harusnya ada bukti tertulis masyarakat yang hadir. Oleh sebab itu peneliti menilai terkait Indikaotr Eksplanasi masih terbilang kurang baik.

Kemudian untuk indikator kedua Kepatuhan/Kepatuhan dalam menjalankan fungsi BPD Berdasarkan Analisa dan observasi peneliti terkait indikator Kepatuhan masih dibilang kurang baik hal tersebut dikarenakan Pemerintah Desa dan BPD mengatakan bahwa prosedur dalam menjalankan fungsinya di Desa Koto Tuo Kopah dengan cara menerima usulan masyarakat, setelah itu disampaikan ke Kepala Desa di Desa Koto Tuo Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Namun dari hasil pengamatan peneliti hal tersebut belum bisa dikatakan benar karena tidak ada bukti tertulis dari usulan aspirasi masyarakat tersebut.

Dan yang seharusnya Pemerintah Desa dan Juga BPD lakukan jika memang prosedur BPD dalam menjalankan fungsinya dengan cara menerima aspirasi dari masyarakat dan di sampaikan ke Kepala desa seharusnya ada bukti dari aspirasi tersebut. Selain itu hasil wawancara dengan masyarakat yang mengatakan bahwa prosedur BPD dalam menjalankan fungsinya di Desa Koto Tuo Kopah belum sesuai prosedur karena BPD jarang melaksanakan rapat, dan seharusnya seperti pembangunan di ajukan pada rapat yang di pimpin oleh BPD. Berdasarkan hal tersebut BPD kurang konsisten dengan perbuatannya. Oleh sebab itu peneliti menilai terkait Indikator kepatuhan masih terbilang kurang baik.

Selanjutnya indikator ketiga Audit/ Kebijakan BPD dalam mencapai sasaran Berdasarkan Analisis dan observasi peneliti terkait indikator Audit/Kebijakan BPD dalam mencapai sasaran masih dibidang kurang baik hal tersebut dikarenakan Pemerintah Desa dan BPD mengatakan bahwa mereka dalam menyelenggarakan musyawarah dengan masyarakat di Desa Koto Tuo Kopah sudah terserap seluruh aspirasi masyarakat Desa Koto Tuo Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Namun menurut hasil penganmatan peneliti jika aspirasi masyarakat sudah terserap kenapa masih ada aspirasi-aspirasi lainnya yang belum terwujud.

Selain itu masyarakat mengatakan BPD sangat jarang melakukan musyawarah desa dan ketika ada musyawarah desa yang di bahas hanya gotong royong dan tentang jalur saja tidak mengenai sebagaimana fungsi dari BPD tersebut yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Koto Tuo Kopah. Seharusnya BPD dalam menyelenggarakan musyawarah desa harus lebih mementingkan pelaksanaan pembangunan desa, serta pemberdayaan desa di Desa Koto Tuo Kopah. Oleh sebab itu peneliti menilai terkait indikator Audit/Kebijakan BPD dalam mencapai sasaran masih terbilang kurang baik.

Selanjutnya indikator keempat Akunting/ Sarana dalam menampung aspirasi masyarakat Dan hasil Analisa peneliti terkait indikator Akunting/Sarana dalam menampung aspirasi masih terbilang kurang baik hal tersebut dikarenakan Pemerintah Desa dan juga BPD mengatakan bahwa kebijakan dalam menampung aspirasi masyarakat di Desa Koto Tuo Kopah yaitu mengumpulkan aspirasi-aspirasi dan disampaikan ke Kepala Desa di Desa Koto Tuo Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Namun hal tersebut belum bisa peneliti katakan dengan benar karena tidak ada bukti tertulis yaitu tidak ada bukti usulan-usulan dari masyarakat sewaktu peneliti meminta kepada BPD.

Seharusnya jika memang ada aspirasi-aspirasi yang di sampaikan oleh masyarakat seharusnya ada bukti seperti catatan agar semua usulan tidak ada yang ketinggalan. Dan untuk memudahkan masyarakat menyampaikan aspirasi sebaiknya BPD membuat akun media sosial seperti grup WA untuk menampung aspirasi masyarakat. Agar masyarakat Desa Koto Tuo Kopah lebih mudah untuk menyalurkan aspirasinya demi memenuhi kebutuhan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat di Desa Koto Tuo Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan hal tersebut peneliti menilai terkait indikator Akunting/ Sarana dalam menampung aspirasi masyarakat masih terbilang kurang baik.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian melalui hasil wawancara, melalui hasil dokumentasi, dan hasil observasi terkait Evaluasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Koto Tuo Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2014-2020 dapat dinilai kurang baik. Dengan jumlah 4 indikator dinilai kurang baik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya kepada kita sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Sholawat dan salam atas

junjungan alam nabi besar Muhammad SAW, mudah-mudahan dengan seringnya bersalawat kita termasuk umat yang mendapat syafaat beliau di akhir kelak nanti, aamiin.

Skripsi ini hasil karya ilmiah yang di susun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana (S1) Jurusan Administrasi Negara. Untuk itu melalui tulisan ini, penulis ucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Ibu Ir. Hj. Elfi Indrawanis, MM, Selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Zul Ammar, SE., ME, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Bapak Desriadi, S. Sos., M.Si Selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan dorongan dan semangat bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
4. Bapak Alsar Andri, S. Sos., M.Si Selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan waktu serta saran-saran untuk penyelesaian Skripsi ini.
5. Bapak/ Ibu Dosen Administrasi Negara yang telah mendidik dan banyak memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis bisa seperti ini, mengerti apa yang belum penulis mengerti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.
6. Staf Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan pelayanan bagi penulis yang berkaitan dengan Administrasi dalam penyusunan Skripsi ini.
7. Serta Kepada Sahabat Nurhidayu, Zelika Fitri Dewi, Agmelia Eka Rahayu Sandra, dan Rekan-rekan seperjuangan Administrasi Negara Kelas C angkatan Tahun 2016 terima kasih atas motivasi dan bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. 2010. *Metodologi Penelitian sosial dan Ilmu Hukum*. Grani : Jakarta.
- Arikunto. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bumi Aksara : Jakarta.
- Fahmi, Irham. 2016. *Perilaku Organisasi Teori, Aplikasi, dan Kasus*. Alfabeta : Bandung.
- Iskandar. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)*. Gaung Persada Press : Jakarta.
- Maksudi, Irianwan, Beddy. 2017. *Dasar-dasar Administrasi Publik*. PT Raja Grafindo Persada : Depok.
- Moleong, Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya : Bandung.
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. PT Gramedia : Jakarta.
- Nugroho, Riant. 2009. *Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi*. PT Gramedia : Jakarta
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga : Jakarta.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Alfabeta : Bandung.
- Pasolong, Harbani. 2016. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Alfabeta : Bandung.
- Riduwan, 2009. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Alfabeta : Bandung.
- Rosidah dan Ambar Teguh Suslistiyanti. 2003. *Organisasi Dan Manajemen*. Erlangga : Jakarta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta : Bandung.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Alfabeta : Bandung.

- Syafii, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. PT Bumi Aksara : Jakarta.
- Syafiie. 2003. *Sistem Administrasi Negara*. Rineka Cipta : Jakarta.
- Usman, Husaini dan Setiady Akbar. 2017. *Metodologi Penelitian Sosial*. PT Bumi Aksara : Jakarta.
- Widjaja. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Zainal, Nining Haslinda. 2008. *Analisis Kesesuaian Tugas dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai pada Sekretariat Pemerintah Kota Masasar*. Universitas Hassanuddin : Makasar.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa